

HARMONISASI NASIONALISME DALAM BINGKAI UKHUWAH ISLAMIAH

**Ruslina Dwi Wahyuni¹, Royan Ahila Firdaus², Muhammad Rosyid Ridho³,
Mutia Azizah Nuriana⁴**

Sekolah Tinggi Agama Islam Mulia Astuti (STAIMAS) Wonogiri^{1,2,3,4}

Email: roselynaa@gmail.com¹, royanahila@gmail.com²,

muhammadrosyid726@gmail.com³, mutia.azizah08@gmail.com⁴

ABSTRAK

Penulisan ini ingin mengkaji tentang nasionalisme dalam keberagaman etnis dan munculnya separatisme di Indonesia dalam bingkai ukhuwah islamiyah. Nasionalisme merupakan hal yang mutlak wajib dimiliki oleh setiap warga negara. Nasionalisme dapat menumbuhkan rasa cinta tanah air kepada bangsa dan negara oleh setiap warga negara. Keberagaman yang ada di Indonesia mulai dari suku, bahasa, ras, agama dan kepercayaan menjadikan bangsa Indonesia sebagai salah satu negara paling majemuk di dunia, dari hal ini dapat menjadi dua mata pisau apakah berdampak pada hal yang positif atau malah berdampak pada hal yang negatif. Metode yang digunakan dalam penulisan ini yaitu jenis riset kepustakaan (*library research*). Hasil penelitian ini adalah bagaimana menyikapi keberagaman yang ada di Indonesia ini dengan berbagai perspektif salah satunya dalam bingkai ukhuwah islamiyah, dalam perspektif yang positif ketika keberagaman ini bisa dikembangkan dan diatur oleh regulasi yang jelas, akan berdampak pada tingkat atau taraf kehidupan masyarakat yang lebih meningkat, tetapi jika sebaliknya maka akan muncul paham-paham separatisme yang menentang setiap aturan yang telah dibuat oleh pemerintah yang tujuannya ingin menghancurkan integrasi bangsa yang telah kuat. Maka, implementasi sikap nasionalisme ini harus betul-betul dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga integrasi masyarakat akan tercapai sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia.

Kata Kunci: Nasionalisme, Keberagaman, Etnis Separatisme, Ukhuwah Islamiyah.

ABSTRACT

This writing aims to examine nationalism in ethnic diversity and the emergence of separatism in Indonesia within the framework of Islamic brotherhood (ukhuwah islamiyah). Nationalism is an essential trait that every citizen must possess. It fosters a sense of patriotism towards the nation and country among all citizens. The diversity in Indonesia, ranging from ethnicity, language, race, religion, and beliefs, makes Indonesia one of the most diverse countries globally. This diversity can be a double-edged sword, impacting either positively or negatively. The method employed in this writing is library research. The findings of this study reveal how to approach Indonesia's diversity from various perspectives, including within the framework of ukhuwah islamiyah. When diversity is embraced positively and regulated by clear regulations, it can significantly enhance the standard of living and societal well-being. Conversely, mishandling diversity may lead to separatist ideologies that defy government regulations aimed at preserving national unity. Therefore, the implementation of nationalism must be practiced diligently in daily life to achieve societal integration as envisioned by the Indonesian nation.

Keywords: Nationalism, Diversity, Ethnicity, Separatism, Islamic brotherhood

PENDAHULUAN

Pada masa awal Islam, hijrahnya Nabi Muhammad ke Madinah menandai periode kritis dalam membangun persatuan dan harmoni di antara berbagai komunitas. Harmonisasi nasionalisme dalam bingkai Ukhuwah Islamiyah ini sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang kohesif. Madinah merupakan rumah bagi berbagai suku dan kelompok agama, dan tugas Nabi Muhammad adalah membangun komunitas yang didasarkan pada saling menghormati, keadilan, dan solidaritas. Beliau menekankan pentingnya persaudaraan di antara umat Islam serta aliansi dengan non-Muslim untuk menjamin perdamaian dan kerjasama. Piagam Madinah, sebuah dokumen bersejarah yang disusun oleh Nabi Muhammad, menetapkan prinsip-prinsip pemerintahan dan keberagaman hidup bersama, yang menyatukan warga Madinah di bawah tujuan bersama sambil menghormati identitas individu mereka. Model awal inklusivitas dan persatuan di bawah panji iman dan nasionalisme ini menjadi contoh abadi bagi masyarakat modern yang berusaha menyeimbangkan identitas nasional dengan harmoni keagamaan (Akbar, Amelia, and Rodoni 2023).

Bangsa Indonesia menjadi salah satu negara yang ada didunia ini dengan keadaan masyarakat yang begitu beragam. Adapun kondisi ini terbagi menjadi dua macam yaitu dilihat dari segi horizontal dan vertikal. Secara horizontal, dapat dilihat dari adanya keberagaman agama, suku, ras, budaya dan kepercayaan. Sedangkan jika dilihat dari segi vertikal yaitu adanya hierarki sosial antara masyarakat menengah kebawah dan masyarakat menengah keatas. Dalam kasus ini, menunjukkan keadaan sosial di Indonesia begitu beragam dan kompleks. Hal inilah yang mendorong adanya potensi konflik antar suku, susahny membangun integrasi nasional dan kesenjangan sosial semakin tinggi. Maka berkaca dari situasi demikian, seharusnya antara pemerintah dan masyarakat harus saling bersinergi didalam menjaga integrasi nasional (Bikhu Parekh, 2008:81).

Ketika masyarakat dan pemerintah tidak bisa saling berkolaborasi, maka yang akan terjadi adalah munculnya paham separatisme. Perlu kita pahami, bahwa paham separatisme ini bisa menimbulkan masalah yang serius ketika tidak bisa dicegah atau diatasi dengan tepat seperti terjadinya kesenjangan sosial dimasyarakat yang nantinya akan berdampak pada disintegarsi masyarakat. Maka dari itu perlu adanya penanaman rasa cinta tanah air atau jiwa nasionalisme mulai sejak dini, mulai dari sistem pendidikan yang mengajarkan cinta tanah air hingga dibuatnya ajang-ajang yang bisa menumbuhkan rasa nasionalisme.

Dalam hal ini, akan dibahas lebih lanut mengenai tugas negara didalam mencegah separitsme teutama kasus yang terjadi di Papua yaitu gerakan Organisasi Papua Merdeka (OPM). Yang mana gerakan ini menjadi ancaman serius bagi negara khususnya menyangkut integrasi nasional. Dilihat dari segi sejarah negara Indonesia terdidi dari berbagai suku mulai dari Jawa, Batak, Sunda, Papua dan lain-lain. Persatuan dari masing-masing suku inilah yang menyebabkan Indonesia dijuluki negara bangsa. Akan tetapi, bangsa memiliki makna secara sosiologis yang berkaitan dengan pengertian kebudayaan atau masyarakat. Maka dari itu, ketika suatu negara yang memiliki penduduk lebih dari satu suku bangsa, bukan merupakan negara bangsa, namun negara multibangsa serta kebudayaannya melahirkan minoritas bangsa (Will Kymlicka, 2003:16). Disisi lain, secara keadaan sosial masyarakat yang memiliki perbedaan antara kalangan atas dengan kalangan bawah yang disebabkan karena kemajemukan masyarakat yang ada ini bisa berefek pada kemampuan akses masyarakat didalam hal politik dan ekonomi, yang tentunya ketiak tidak ada tindak lanjut yang konkret akan menyebabkan terjadinya disintegrasi nasional termasuk lahirnya paham separatisme (Arrochman Ardiansyah, 2001:3).

Dengan keadaan negara Indonesia yang multietnis ini, tentunya memiliki tantangan bagi integrasi nasional. Sehingga sampai lahir paham yang menganggap suku atau golongannya ini lebih baik dari suku lainnya yang sering dinamakan primordialisme, yang menyebabkan lahirnya gerakan-gerakan separatisme setelah proklamasi kemerdekaan pada

tahun sekitar 1950 an seperti Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Operasi Papua Merdeka (OPM). Paham separatis ini ternyata terus berkembang hingga pada masa orde lama dan orde baru karena adanya peraturan pemerintah yang membatasi daerah untuk mengelola sumber daya alamnya sendiri, hal ini memunculkan rasa iri dari daerah kepada pemerintah khususnya pemerintah pusat yang akibatnya hal ini berdampak pada terancamnya integrasi nasional. Maka dari itu, paham separatis ini harus menjadi perhatian penuh baik itu dari pemerintah ataupun masyarakat sekitar, agar paham separatisme ini bisa dicegah dan tidak menimbulkan perpecahan khususnya bagi bangsa Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penulisan ini yaitu jenis riset kepustakaan (*library research*). Penulisan pustaka merupakan rangkaian acara yang yang menyangkut proses pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian (Mestika Zed,2008.3). Namun Mahmud menjelaskan dalam bukunya Metode Penelitian Pendidikan bahwa penulisan kepustakaan yaitu jenis riset yang dilaksanakan melalui membaca jurnal atau buku untuk yang diperoleh dari berbagai sumber seperti perpustakaan dan internet (Mahmud, 2011.31). Maka penulisan kepustakaan ini didasarkan pada sumber-sumber valid dan dapat dipertanggung jawabkan.

Namun yang lebih penting, seorang penulis wajib menggunakan data-data yang sudah benar sehingga dapat dijamin keasliannya. Caranya yaitu penulis mencari literatur yang terpercaya salah satunya dari buku yang ditulis oleh para profesor yang sudah diakui. Terakhir data pustaka memiliki dasar argumen, sehingga terpercaya (Mestika Zed,2008.3).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Nasionalisme

Nasionalisme merupakan suatu kepercayaan mengenai rasa cinta dan bangga kepada keberlangsungan suatu negara. Kepercayaan ini berasal dari adanya nilai historis, kebudayaan dan identitas yang serupa. Hal ini berdampak pada munculnya rasa ingin membangun dan menjada keutuhan suatu golongan yang biasa dikenal dengan bangsa atau negara. Mengacu pada ajaran pokok dari nasionalisme yang diambil dari berbagai pendapat yang menjabarkan bahwa bangsa menjadi sumber dari semua kekuatan sosial dan politik, dunia yang terbagi menjadi bangsa-bangsa dan kecintaan terhadap bangsa yang mengalahkan terhadap kecintaan yang lain. ketika dunia ingin damai dan adil, maka masyarakat wajib memilih atau bertempat dinegara yang dicintainya sehingga tidak tercipta kehidupan yang bebas (Ryan, 2005: 139).

Didalam mengetahui arti dari nasionalisme secara utuh, maka langkah awalnya dimulai dari mengerti tentang konsep bangsa (*nation*). Adapun bangsa yaitu gabungan dari kelompok-kelompok yang mempunyai ciri-ciri seperti nilai historis, wilayah tempat tinggal, bahasa dan suku yang masih serumpun (Hobswan, 1990: 5). Antara etnik dengan bangsa ini berbeda, tetapi untuk mencari perbedaan etnik dan bangsa ini bukan perkara yang mudah sebab dua hal ini sangat subjektif dari bagaimana cara setiap individu dalam mengartikannya. Pada dasarnya bangsa merupakan masalah jati diri sedangkan identitas yaitu gabungan dari perbedaa-perbedaan seperti agama, budaya, ras dan sejarah yang kesemuanya itu digabungkan. Pada akhirnya ketika identitas itu memiliki kekuatan politik dan menjadi faktor utama pergerakan secara nasional maka hal ini dapat disebut sebagai rasa nasionalisme (Viotti & Kauppi, 2007: 464).

Jati diri atau identitas individu menjadi hal mendasar yang memisahkan antara kelompok manusia yakni masyarakat dengan kelompok lainnya dalam kehidupan sosial. Dalam pengertian yang lebih luas lagi identitas ini juga memisahkan antara suatu bangsa dengan bangsa yang lain. Maka identitas ini menjadi satu kesatuan yang utuh dari setiap bangsa yang tidak dapat dipisahkan. Dalam prakteknya seringkali etnik dan bangsa ini selalu

dihubungkan dan dalam penyebutannya juga terkadang kedua hal ini dianggap sama. Akan tetapi istilah dari keduanya ini mempunyai arti yang berbeda.

Etnik merupakan gabungan dari individu-individu yang meyakini bahwa mempunyai nenek moyang yang sama. Sedangkan bangsa yaitu kelompok manusia yang memiliki rumpun budaya yang serupa dan juga sepakat untuk hidup secara berdampingan dalam satu bingkai atau satu bangsa. Adapun bahasa yang menjadi faktor penentu utamanya ikatan bangsa ini. Dalam implementasinya bangsa ini dibagi menjadi dua macam, yaitu *social nation* dan *ethnic nation*. *Social nation* adalah keadaan bangsa yang berasaskan pada kelompok multi-etnik. Adapun *ethnic nation* dapat diketahui dari satu golongan atau kelompok. Dari kedua hal ini memiliki kesamaan karakteristik yaitu dari bahasa, nilai historis dan nilai-nilai yang berkaitan dengan rasa mempunyai bangsa. Pejabat-pejabat negara yang kemudian menyebarkan faham nasionalisme ini. Nasionalisme menjadi tindakan nyata para aktor politik didalam mencapai misi-misi politiknya, artinya nasionalisme menjadi faktor peting dalam pondasi politik (Suryadinata, 2000: 344).

Maka paham nasionalisme ini memiliki kaitan yang kuat dalam hal politis yang ketika diartikan lebih lanjut menyangkut rasa cinta terhadap bangsa dan negara. Dengan demikian, paham ini sangat penting untuk dimiliki oleh setiap masyarakat dalam suatu negara karena dapat menumbuhkan rasa menjaga negara yang dicintainya maupun untuk proses pembangunan nasional.

Konsep Etnik

Etnik bersumber dari bahasa Yunani yaitu Ethnos, yang berarti orang atau bangsa. Seringkali ethnos dimaknai golongan sosial yang didasarkan pada peraturan, bahasa, bahasa dan adat istiadat yang menunjukkan identitas suatu golongan dalam masyarakat. Golongan etnik ini dapat bertahan dan melahirkan generasi-generasi yang baru, serta memiliki rasa cinta dan komunikasi yang baik, sehingga dapat membedakan antara golongan etnis yang satu dengan kelompok etnis lainnya (Alo Liliweri, 2005:8-9).

Istilah etnik berhubungan dengan keturunan dan kelahiran setiap individu, meskipun kedua hal ini tidak selalu menjadi faktor utama suatu etnik. Keotentikan setiap manusia menjadi sesuatu yang sangat diperhatikan, namun tidak menutup kemungkinan adanya pemisahan. Secara sosial sosiologi etnik adalah keadaan yang ditetapkan. Akan tetapi, etnik ini dapat berkembang lagi karena etnik ini mengacu pada keyakinan setiap individu. Dari hal ini, dapat diprediksi perbedaan antara karakteristik fisik dan konsep etnik dalam kondisi tidak bergerak. Golongan etnik ini dapat dibagi berdasarkan tingkatan kehidupan, ras, bahasa warna kulit dan kepercayaan (Larry Diamond dan Marc F. Plattner, 1998:20).

Namun pada kenyataannya etnik ini tidak bersifat tetap karena masih bisa terjadi perpecahan karena disebabkan oleh berbagai faktor seperti adanya masalah antar sesama etnik yang tidak dapat diselesaikan dengan baik, sehingga etnik-etnik ini memilih jalur untuk memisahkan diri dari etnik asalnya. Hal ini dapat terjadi, karena etnik-etnik ini tidak dapat dijaga dengan baik mulai dari aturan yang dibuat tidak bersifat mengikat atau tegas yang menyebabkan individu-individu tertentu ingin memisahkan diri karena merasa sudah tidak sepuas lagi.

Kebangsaan dan Negara

Bangsa merupakan suatu lembaga yang berhasil mengelola setiap individu, sehingga merasa bahwa mereka itu menjadi suatu kebangsaan yang satu. Maka dari itu, rencana yang berkaitan dengan bangsa ini membahas tentang bagaimana suatu golongan itu sepakat untuk membentuk suatu bangsa (Harold R. Isaacs, 1993:228).

Konsep bangsa modern memiliki dua makna yaitu bangsa dalam makna politik dan bangsa dalam arti kultural. Kebangsaan dalam makna politik merupakan pilihan dari masing-masing individu dan sangat tergantung pada suatu unsur yang subjektif. Adapun kebangsaan dalam makna kultural memiliki arti menjadi rakyat suatu bangsa itu bukan sebuah pilihan

akan tetapi sebuah ketetapan karena adanya faktor keturunan dan sejarah, sehingga dalam kebangsaan secara kultural ini sangat tergantung pada faktor objektif (Anthony D. Smith, 2003:193-198)

Keberagaman masyarakat menjadi salah satu unsur yang berpengaruh pada saat negara itu dibentuk dan juga dalam masa perkembangannya. Adapun bagian-bagian dari keberagaman ini terdiri dari adanya keyakinan yang kuat terhadap golongan yang diyakini dan sebaliknya dari hal ini yaitu adanya politik masyarakat. Banyaknya ormas di Indonesia, dapat dijadikan sebagai indikasi bahwa di negara ini menunjukkan keberagaman dan toleransi yang tinggi di tengah masyarakat. (Ridho, 2023). Sistem keberagaman yang menitikberatkan pada keyakinan terhadap budaya dan norma yang berlaku sangat penting bagi kelangsungn kehidupan bangsa karena dapat membnetuk suatu ikatan yang kuat antar warga negara. Akan tetapi, berbeda dengan politik masyarakat yang lebih mementingkan pada prestasi dan kinerja yang dilakukan (Juwono Sudarsono, 1976:20).

Keadaan masyarakat yang memiliki paham keyakinan pada suku atau ras yang kuat seperti ini akan menumbuhkan integrasi yang sangat luas bagi kehidupan bangsa dan negara. Dengan ketidakadaan ikatan-ikatan semacam ini maka akan muncul paham-paham separatisme ditimbulkan dari adanya perbedaan kepercayaan, suku, ras, agama dan golongan. Adanya pembangunan nasional ini menjadi langkah nyata didalam menjaga keberlanjutan suatu bangsa yang memiliki keberagaman, sehingga meskipun perbedaan ini tetap ada tapi tidak sampai menimbulkan disintegrasi nasional dan bahkan berdampak baik bagi kemajuan peradaban suatu bangsa dimasa yang akan datang (Juwono Sudarsono, 1976:22).

Tantangan yang ada didalam suatu bangsa sangat berkaitan dengan keadaan ekonomi dan politik yang terjadi. Ketika para pemangku kebijakan yaitu pemerintah gagal mewujudkan keberhasilan terutama dalam bidang ekonomi dan politik, maka kedua hal ini akan berdampak pada munculnya golongan-golongan yang merasakan ketidakadilan dan ketertindasan. Dalam kasus ini, masyarakat kecil atau menengah kebawah akan sangat terasa dampaknya. Apabila hal ini tidak dapat ditangani dengan baik akan menyebabkan angka disintegarsi nasional semakin tinggi dan akan memecah belah bangsa (Arrochman Ardiansyah, 2001:297).

Etno-Nasionalisme

Etno nasionalisme adalah suatu tentang kebangsaan itu terdiri dari suku, ras dan agama yang menjadi pondasi utamanya. Pada implementasinya etno nasionalisme ini memicu hal-hal yang bersifat nasionalisme. Termasuk yang mendasari adanya gerakan-gerakan nasionalisme ini adalah karena adanya faktor-faktor ekonomi dan politik bahkan seringkali melibatkan emosional karena sangat erat dengan dengan dengan suku atau bangsa yang begitu dicintai, sehingga membentuk suatu ikatan yangerat anatar masyarakat (Arrochman Ardiansyah, 2001:301). Nasionalisme etnis ini menjadi fundamen penting terbentuknya suatu kebangsaan karena adanya rasa yang sama baik itu budaya etnis dan kepercayaan seperti nasionalisme Islam, nasionalisme Ambon, nasionalime Jawa atau nasionlisme Batak (Mhadjir M. Darwin, 2007)

Pengertian Separatisme

Separatisme adalah paham yang lahir karena adanya pergerakan yang dilaksanakan oknum-oknum tertentu dengan tujuan untuk memecahkan diri dari bangsa yang berdaulat sehingga bisa membangun negara yang baru sesuai yang dengan asas yang golongan tersebut percayai (Firmansyah, 2011).

Setelah proklamasi kemerdekaan, negara Indonesia menghadapi gerakan-gerakan separatisme mulai dari di Timor Timur, Aceh, dan Papua. Walaupun gerakan-gerakan separatisme ini sudah dapat diatasi, akan tetapi embrio-embrio dari paham separatisme ini masih terus berkembang. Hal ini tentunya harus menjadi perhatian penuh bagi pemerintah untuk dapat segera diatasi dan dicegah hingga keakar-akarnya (Dewi & Utari, 2021).

Sejarah Lahirnya Separatisme di Indonesia

Secara historis paham separatisime di Indonesia ini muncul ketika adanya penjajahan masa kolonial Belanda. Pada waktu itu gerakan separatisme melawan kolonialisme Belanda diawali dengan adanya Gerakan Aceh Merdeka yang terjadi pada sekitar abad 20. Hal ini disebabkan karena warga Aceh merasa tidak puas terhadap kebijakan Belanda yang mengambil hak-hak mereka secara paksa. Sampai pada saat proklamasi kemerdekaan tahun 1945, diberbagai daerah lahir gerakan yang sama pada tahun 1961. Akhirnya Presiden Soekarno sebagai kepala negara mengambil tindakan tegas dengan membentuk suatu gerakan trikora guna meredam paham separatisme ini yang dan menghasilkan pada tahun 1963 Irian Barat secara sah menjadi bagian dari negara Indonesia.

Meskipun gerakan separatisme di Bumi Cendrawasih sudah bisa diredam pada saat itu, ternyata masih ada sebagian individu yang tetap meyakini paham separatisme ini yaitu adanya Gerakan Papua Merdeka (OPM). Sampai saat ini gerakan ini masih sangat aktif adapun cara preventif yang dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan melakukan dialog-dialog terbuka guna mengetahui apa kendala dan keluh kesah rakyat Papua terutama pembangunan infrastruktur yang mulai digalakkan di Bumi Papua (Sinaga, 2021). Gerakan Papua Merdeka ini telah banyak sekalian melakukan tindakan yang begitu merugikan negara dan bahkan sampai ada warga sipil yang meninggal dunia karena tidak sepaham dengan mereka. Bahkan mereka sampai melakukan tindakan pencegahan dan perampasan proyek pembangunan infrastruktur di Papua Barat, penghancuran jaringan pipa gas dan listrik. Yang paling dikhawatirkan lagi paham ini bisa meningkat menjadi gerakan terorisme karena mereka mempunyai amunisi yang cukup dibidang persenjataan (Noor, 2018).

Kita kembali lagi menengok sejarah lahirnya paham separatisme di Indonesia yaitu antara tahun 1945 sampai 1965. Ada beberapa daerah yang ingin mendirikan negara sendiri seperti halnya adanya gerakan Negara Islam Indonesia (NII) yang memproklamkan diri menjadi negara merdeka pada tahun 1949. Akan tetapi, negara Indonesia bisa mencegahnya dengan tidak menganggap kemerdekaan NII sah secara yuridis dan de facto (Ausop, 2009).

Setelah adanya gerakan NII, lahir lagi gerakan yang sebenarnya sudah ada sejak zaman kolonial Belanda akan tetapi muncul kembali yaitu Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada tahun 1953. Namun, gerakan ini berhasil diatasi pada tahun 1962 dengan dibentuknya otonomi khusus bagi daerah Aceh. Meskipun demikian, ternyata pada tahun 1976 GAM ini lahir lagi. Adapun GAM terus berkembang yaitu pada tahun 1989. Karena mereka memiliki tujuan yang sama yaitu untuk mendirikan negara Aceh. Karena pergerakan mereka sudah melakukan tindakan-tindakan kekerasan, maka pemerintah Indonesia mengambil tindakan tegas dengan melaksanakan operasi militer secara masif di daerah Aceh. Ternyata hal ini bukan malah meredam konflik tapi malah menambah masalah yang baru seperti adanya tindakan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) (Pratiwi, 2019). Setelah berjuang sekian lama, akhirnya pada tahun 2003 pemerintah berhasil membuat perjanjian dengan GAM. Yaitu adanya kesepakatan Helsinki pada tahun 2005 yang mendai berakhirnya konflik dan pemerintah Indonesia memberikan hak otonomi khusus kepada Aceh. Semenjak itulah konflik separatisme di Aceh mulai meredam dan sekarang keadaan bisa dikatakan aman dan damai (Ulya, 2016).

Sebetulnya selain adanya gerakan separatisme di Aceh dan Papua, ada beberapa gerak lagi yang berkaitan dengan tindakan separatisme ini yaitu yang terjadi di Sulawesi Selatan dan Timor Timur. Namun, sangat disayangkan gerakan separatisme di Timor Timur pada tahun 1999 tidak dapat dicegah oleh pemerintah Indonesia, karena adanya campur tangan dari PBB akhirnya Timor Timur mendirikan negaranya sendiri yang sekarang dikenal dengan Timor Leste (Suryo, 2003).

Dalam tinjauan historis, penyebab munculnya gerakan separatisme di Indonesia ini dipengaruhi oleh dua faktor utama yaitu faktor politik dan faktor budaya. Secara politik adanya kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang dirasa tidak adil kepada sebagian rakyat dapat memicu lahirnya paham separatisme ini. Selanjutnya karena faktor kebudayaan, ketika ada

berbagai kebudayaan yang menempati satu wilayah dan tidak adanya integrasi yang baik juga akan memicu lahirnya paham separatisme (Suharyo, 2010). Adapun peran konkret dari pemerintah untuk mengatasi paham separatisme ini yaitu dengan adanya pemerataan pembangunan infrastruktur diberbagai wilayah dan seringnya dilaksanakan kegiatan dialog-dialog antar masyarakat guna mengetahui apa yang sedang dialami warga pada daerah tertentu khususnya daerah yang rawan konflik.

Penyebab Separatisme

Paham separatisme di Indonesia menjadi salah satu momok bagi keberlangsungan kedaulatan negara Indonesia. Dibawah ini akan dibahas tentang apa saja faktor yang menyebabkan gerakan separatisme ini, yaitu

1. Ketidakpuasan Terhadap Pemerintah

Ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah juga dapat memicu munculnya paham separatisme ini. Mulai dari minimnya fasilitas kesehatan, akses pendidikan yang tidak memadai ditambah dengan pembangunan infrastruktur yang tidak merata akan meningkatkan rasa ketidakpuasan terhadap pemerintah

2. Konflik Identitas

Ketika terjadi masalah antar agama, suku, ras dan kebudayaan karena adanya perasaan tidak diakui atau dikucilkan oleh golongan tertentu, tentunya hal ini juga berdampak pada lahirnya paham separatisme.

3. Kesenjangan Ekonomi

Kurangnya akses mencari lapangan kerja dan angka kemiskinan yang tinggi juga memicu lahirnya paham separatisme ini, ditambah lagi kesenjangan yang begitu kentara antara wilayah yang tertinggal dengan wilayah yang maju secara ekonomi.

4. Intervensi Asing

Adanya campur tangan dari pihak luar akan sangat memperburuk keadaan suatu negara yang sudah memiliki bibit-bibit separatisme. Karena mereka merasa didukung baik itu secara pendanaan, persenjataan bahkan ada yang sampai diberikan pelatihan militer guna melawan pemerintahan yang berdaulat

5. Propaganda

Adanya hasutan baik itu yang disebarluaskan secara langsung atau melalui media sosial juga dapat memicu lahirnya paham separatisme.

RUU Keamanan Nasional

RUU Keamanan Nasional Indonesia (RUU Kamnas) merupakan landasan hukum untuk mengatasi berbagai macam gangguan yang berpotensi merusak kedaulatan negara Indonesia salah satunya tentang separatisme. RUU Kamnas ini diawali pada tahun 2016 dan terus memalui serangkaian pembahasan lebih dalam lagi di DPR. RUU Kamnas ini juga berisi tentang pasal-pasal yang berhubungan dengan usaha pemerintah didalam mengatasi separatisme. Adapun pasal yang menjadi perhatian di RUU Kamnas ini adalah pasal 7 yang berisi tentang Pengamanan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pasa ini berisi ketika negara mendapat gangguan yang akan menghancurkan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka negara berhak melakukan tindakan pengamanan sesuai dengan peraturan yang berlaku (Suharyo, 2010).

RUU Kamnas juga memuat tentang peran aktif masyarakat didalam menjaga stabilitas nasional khususnya dibidang keamanan. Didalam pasal 32 RUU Kamnas memuat tentang wajibnya masyarakat ikut andil didalam menjaga kedaulatan bangsa dan mencegah semua perilaku yang mengancam keamanan nasional (Hikam, 2016). Meskipun demikian, RUU Kamnas ini juga tidak terlepas dari kontroversi dan menuai kecaman dari banyak pihak terutama pada pasal 27 yang membatasi kebebasan berpendapat dan juga dalam membentuk organisasi. Maka dari itu, agar didalam implementasi RUU Kamnas ini bisa berjalan sesuai yang diharapkan antara pemerintah dan masyarakat harus saling bersinergi guna memperbaiki

pasal-pasal yang dirasa belum sesuai terutama yang menyangkut tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dan demokrasi.

Bingkai Ukhuwah Islamiyah

Ukhuwah Islamiyah merupakan konsep sentral dalam ajaran Islam yang menekankan persaudaraan dan solidaritas di antara umat Muslim. Konsep ini tidak hanya mencakup hubungan sosial antarindividu Muslim, tetapi juga meluas ke dalam konteks masyarakat dan bangsa Islam secara luas. Ukhuwah Islamiyah didasarkan pada asas kesatuan dalam keimanan kepada Allah dan Rasul-Nya, di mana setiap individu Muslim dianggap sebagai saudara atau saudari dalam agama tanpa memandang ras, etnis, atau latar belakang sosial mereka. Ini mendorong solidaritas sosial yang kuat, mengajarkan nilai-nilai keadilan dalam hubungan antarindividu dan kelompok, serta mempromosikan kerjasama dan kolaborasi untuk mencapai tujuan bersama dalam masyarakat. Konsep ini juga menjadi pondasi ketahanan sosial, menawarkan rasa keamanan dan keadilan yang diperlukan untuk pertumbuhan yang berkelanjutan dalam komunitas Muslim. Untuk memperkuat Ukhuwah Islamiyah, pendidikan dan penyuluhan tentang nilai-nilai persaudaraan Islam sangat penting, sehingga setiap individu dapat memahami dan mengamalkan prinsip-prinsip ini dalam kehidupan sehari-hari, baik secara lokal maupun global.

Ukhuwah Islamiyah juga memainkan peran penting dalam membangun harmoni dan perdamaian di antara umat Islam, serta mempromosikan toleransi terhadap perbedaan pendapat dan pemahaman dalam agama. Hal ini diperkuat oleh contoh yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW dalam menjalani kehidupan sehari-hari dan berinteraksi dengan berbagai suku dan kelompok di Madinah saat awal hijrah. Rasulullah tidak hanya membangun hubungan yang kuat dengan penduduk Madinah yang beragam, tetapi juga mengembangkan sebuah konstitusi yang meneguhkan persatuan di antara mereka berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, saling menghormati, dan bekerja sama untuk kebaikan bersama. Ini memberikan contoh nyata tentang bagaimana Ukhuwah Islamiyah dapat menginspirasi dan membentuk masyarakat yang adil, inklusif, dan berdaya tahan, di mana setiap individu merasa dihargai dan memiliki kontribusi yang penting dalam kemajuan dan kesejahteraan bersama.

KESIMPULAN

Ukhuwah Islamiyah adalah konsep sentral dalam Islam yang menekankan persaudaraan, solidaritas, dan kesatuan umat Muslim tanpa memandang perbedaan ras, etnis, atau latar belakang sosial. Konsep ini mendorong terciptanya solidaritas sosial, nilai-nilai keadilan, serta kerjasama untuk mencapai tujuan bersama, menjadi pondasi dalam membangun masyarakat yang inklusif dan berdaya tahan.

Rasa nasionalisme harus betul-betul ditanamkan didalam sanubari rakyat Indonesia, karena dengan memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi akan mencegah dari segala bentuk hambatan atau tantangan yang akan dihadapi suatu bangsa. Sudah kita ketahui bersama bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang majemuk artinya negara Indonesia ini memiliki berbagai macam suku, ras, agama, budaya dan kepercayaan. Tidak hanya itu negara Indonesia juga mempunyai berbagai etnis, maka dari itu ketika setiap warga negara memiliki rasa nasionalisme yang tinggi akan meredam setiap gejolak yang ada karena adanya kemajemukan ini.

Akan tetapi, ketika negara dan masyarakat gagal berkolaborasi dengan baik, maka yang yang dihasilkan malah sebaliknya yaitu munculnya paham separatisme. Paham ini sebenarnya sudah ada sejak zaman penjajahan kolonial Belanda. Namun, bukannya mereda tapi paham ini kembali tumbuh seperti adanya Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Gerakan Timor Timur dan Operasi Papua Merdeka (OPM). Hal ini tentunya harus menjadi perhatian penuh dari pemerintah dan masyarakat untuk saling menjaga persatuan dan kesatuan Negara Indonesia.

Termasuk dengan menyukseskan RUU Kamnas agar bisa berjalan sesuai dengan harapan terutama didalam menjaga kedaulatan bangsa Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Firman Muhammad Abdurrohman, Erika Amelia, and Ahmad Rodoni. 2023. "ANALISIS KEBIJAKAN EKONOMI SYARIAH ZAMAN RASULULLAH SAW BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM." *Ar Rasyiid Journal of Islamic Studies* 1 (1): 1–12.
- AloLiliweri. 2005 *PrasangkadanKonflik, KomunikasiLintasBudayaMasyarakatMultikultur*. Yogyakarta: LKIS PelangiAksara
- Ausop, A. Z. 2009. *Gerakan Nii Kw Ix Gerakan Nii Kartosoewirjo (Kw Ix)*. Jurnal Sosi oteknologi
- Dewi & Utari, A. 2021. *Korelasi Separatisme Terhadap Self- Determination Dan Hak Asasi Manusia Pada Suatu Wilayah Dalam Hukum Internasional*. Jurnal Kertha Negara.
- Diamond, Larry dan Marc F. Plattner (eds). 1998. *Nasionalisme, Konflik Etnik dan Demokrasi*. ITB Bandung
- D. Smith,Anthony. 2003. *Nasionalisme Teori Ideologi Sejarah*. Jakarta: Erlangga.
- Firmansyah. 2011. *Gerakan Separatisme Terhadap Negara Yang Sah Dan Aspek Pidananya Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus GAM)*. Skripsi.
- Hikam, M. A. 2016. *the Urgency of National Security Act To Anticipate the Future*. Jurnal Pertahanan.
- Hobsbawn, E.J. 1992. *Nasionalisme Menjelang Abad XXI*. Yogyakarta. PT. Tiara Wacana Yoga.
- Kymlicka,Will. 2003. *Kewarganegaraan Multikultural Teori Liberal mengenai Hak-hak Minoritas*. Jakarta: LP3ES.
- Mardiansyah,Arrochman. 2001. *Negara Bangsa dan Konflik Etnis* dalam Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Vol. 4 .
- M. Darwin, Mhadjir. 2007 *Revitalisasi Nasionalisme MadanidanPenguatan Negara di Era Demokrasi*, dalam Pidato Pengukuhan Guru Besar. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Noor, F. 2018. *Analisis Terhadap Kebijakan Pemerintah Tentang Separatisme Papua*. Jurnal Pertahanan & Bela Negara.
- Parekh, Bhikhu. 2008. *Rethinking Multiculturalism : Cultural Diversity and Political Theory*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Pratiwi, E. A. 2019. *Campur Tangan Asing Di Indonesia : Crisis Management Initiative Dalam Penyelesaian Konflik Aceh (2005-2012)*. Historia: Jurnal Pendidik Dan Peneliti Sejarah.
- Ryan, Stephen.2001."Nationalism and Ethnic Conflict" dalam Brian White, Richard Little and Michael Smith (eds). *Issues in World Politics*. Second Edition. Oxford University Press.
- Ridho, Muhammad Rosyid, and Ruslina Dwi Wahyuni. "Menelisik Sisi Hukum Pembubaran Ormas Front Pembela Islam Dalam Perspektif Politik Hukum di Indonesia." Jurnal Honai 3.2 (2023): 51-60.
- Suryadinata, Leo (eds). 2000. *Nationalism and Globalization: East and West*. Institute of Southeast Asian Studies, Singapore.
- R. Isaacs,Harold. 1993. *Pemujaan Terhadap Kelompok Etnis: Identitas Kelompok dan Perubahan Politik*. Jakarta:Yayasan Obor Indonesia.
- Sudarsono,Juwono. 1976. *Pembangunan Politik dan Perubahan Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Sinaga, M. U. 2021. *Konflik Separatisme Papua Dan Implikasinya Terhadap Hubungan Diplomasi Indonesia-Australia*.

- Ulya, Z. 2016. *Refleksi Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki Dalam Kaitan Makna Otonomi Khusus Di Aceh*. Jurnal Konstitusi.
- Suryo, D. 2003. *Separatisme dalam Perspektif Sejarah*. Unisia.
- Suharyo. 2010. *Interaksi Hukum Nasional Dan Internasional Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Separatisme Di Indonesia*.
- Viotti Paul R and Mark V. Kauppi. 2007. *International Relations and World Politics: Security, Economy, Identity*, Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall